

**PERSPEKTIF EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
MENGENAI PENGARUH BELANJA HIBAH,
DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL,
TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
DI PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT**

Tubagus Rifqy Thantawi¹, Abdul Khoiri², Ilah Sakilah³, Teguh Imanudin⁴.

^{1, 2, 3, 4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor

¹trifqythan@febi-inais.ac.id, ²khoriabdul7@gmail.com, ³sakilahilah726@gmail.com,

⁴teguhimanudin698@gmail.com.

ABSTRACT

Regional development is an integral part of national development efforts which are emphasized through the principle of regional autonomy. According to the theory of government spending, when the government allocates a budget for development activities, it will contribute to an increase in aggregate spending and strengthen the country's level of economic activity. In other words, through government spending on regional development, it can encourage overall economic growth and increase economic activity in the country. The purpose of this study is to see that Grant Expenditure and Social Assistance Expenditure partially and simultaneously affect the Gross Regional Domestic Product, as well as to propose ideas for implementing good governance in the Bogor District Government so that Grant Expenditures and Social Assistance Expenditures can increase the impact that better towards growth and equity of the economy through the Gross Regional Domestic Product. The results of this study indicate that the X1 variable (Grant Expenditure) has a positive effect on Y (Gross Regional Domestic Product/GDP) of 0.266, the X2 variable (Social Assistance Expenditure) has a negative effect on Y (Gross Regional Domestic Product/GRDP) of -0.528 and also there is a significant influence between X1 (Grant Expenditures), and X2 (Social Assistance Expenditure), together on Y (Gross Regional Domestic Product/GRDP).

Keywords: Regional Development, Gross Regional Domestic Product, and Good Governance.

ABSTRAK

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari upaya pembangunan nasional yang ditekankan melalui prinsip otonomi daerah. Menurut teori pengeluaran pemerintah, ketika pemerintah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pembangunan, ini akan berkontribusi pada peningkatan pengeluaran agregat dan memperkuat tingkat aktivitas ekonomi negara. Dengan kata lain, melalui pembelanjaan pemerintah dalam pembangunan daerah, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan meningkatkan kegiatan ekonomi di negara tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial, berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap Produk Domestik Regional Bruto, serta untuk memberikan usulan gagasan penerapan *good governance* di Pemerintah Kabupaten Bogor agar Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial, dapat meningkatkan pengaruh yang lebih baik

terhadap pertumbuhan dan pemerataan perekonomian melalui Produk Domestik Regional Bruto. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Variabel X1 (Belanja Hibah) berpengaruh positif terhadap Y (Produk Domestik Regional Bruto/PDRB) senilai 0,266, Variabel X2 (Belanja Bantuan Sosial) berpengaruh Negatif terhadap Y (Produk Domestik Regional Bruto/PDRB) senilai -0,528 Dan juga ada pengaruh yang signifikan antara X1 (Belanja Hibah), dan X2 (Belanja Bantuan Sosial), secara bersama sama terhadap Y (Produk Domestik Regional Bruto/PDRB).

Kata-kata Kunci: Pembangunan Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, dan *Good Governance*.

I. PENDAHULUAN.

Indonesia memiliki 416 dan 98 kota yang tersebar dari sabanng sampai Merauke. Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 14 Tahun 2016 diejalskan bahwa hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain. Badan, usaha milik daerah, Lembaga dan organisasi masyarakat yang berbadan hukum Indonesia, pemberian hibah dilakukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah sesuai dengan urgensi, dan dan kepetningan daerrah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dan memperhatikan atas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat terhadap masyarakat.

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang di laksanakan prinsip otonomi daerah. berdasarkan teori pengeluaran pemerintah yang menjelaskan bahwa pembelanjaan pemerintah terhadap kegiatan pembangunan akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara.

Ketidakmampuan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pemerintah yang di hadapi bangsa indonesia seperti kemiskinan, pengangguran, kekurangan gizi, gangguan keamanan dan lain lain, menjadi indikator kegagalan pemrintah dalam pelaksanaan dan

pembangunan. Dalam UU no 32/2004 tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan otonomi daerah pun harus menekankan prinsip-prinsip demokrasi, serta penguatan (Akadun, 2007).

II. TINJAUAN PUSTAKA.

II.1 Ekonomi Makro Syariah.

Dalam ekonomi terdapat dua cabang ekonomi, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro adalah kajian tentang aktivitas ekonomi suatu negara, sedangkan ekonomi mikro adalah kajian tentang tingkah laku individual dalam ekonomi (Karim, 2007). Ekonomi makro atau makro ekonomi adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari masalah ekonomi secara keseluruhan (agregtif). (pengaruh faktor makro ekonomi terhadap industri harga saham gabungan (IHGS) di bursa efek indonesia). Ekonomi makro mempelajari tentang suatu keadaan ekonomi suatu negara/daerah seperti, pengangguran, kesempatan kerja, pengeluaran negara/daerah, pendapatan, nilai suku buka, kurs/nilai tukar dan lain sebagainya.

Adapun pengertian lain yang menjelaskan ekonomi makro atau makro ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang berurusan dengan berbgai masalah makroekonomi yang penting (major macroeconomic issue) dan sekaligus

merupakan persoalan yang dihadapi di dalam kehidupan sehari – hari. (pegaruh faktor makroekonomi terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga pada bank umum syariah di indonesia). Ekonomi makro islam mempelajari tentang perilaku ekonomi secara menyeluruh dengan berdasarkan prinsip-prinsip islam dengan hukum islam. Ilmu ekonomi makro dalam islam mengacu pada ilmu yang didalamnya banyak pokok bahasan mengenai masalah kebijakan ekonomi makro yang berupa pengelolaan dan pengolahan menurut ajaran islam. Sedangkan ekonomi makro konvensional praktek ekonomi dengan wujud pemberian keleluasaan kepada semua pihak untuk menjalankan kegiatan ekonomi, yang dapat dipantau atau tidak dipantau oleh pemerintah dalam menjalankan kegiatan ekonomi tersebut.

II.2 Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial, dan Pengaruhnya terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 14 Tahun 2016 dijelaskan bahwa hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia (Auliyah dkk., 2020). Pemberian hibah dilakukan untuk menopang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan kepentingan daerah yang mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan sebelumnya (Zebua & Adib, 2014). Pemberian hibah dapat dianggarkan

apabila pemerintah daerah telah memenuhi semua.

II.3 Penerapan *Good Governance* di Pemerintahan.

Ada beberapa asas seperti yang diketahui dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (patut). Pertama, Asas persamaan berarti bahwa hal-hal yang sama harus diperlakukan sama, asas ini merupakan suatu asas yang hidup dengan kuat dalam lingkungan administrasi. Kedua asas kepercayaan termasuk kedalam asas-asas hukum yang paling mendasar dalam hukum publik dan hukum perdata. Asas ini terutama penting sebagai dasar bagi arti yuridis dari janji-janji, keterangan, aturan kebijakan, dan bentuk rencana (yang tidak diatur dengan undang-undangan). Ketiga asas kepastian hukum asas ini memiliki dua aspek yang satu lebih bersifat material, yang lain masih bersifat formal. Keempat asas kecermatan asas kecermatan ini bahwa suatu ketetapan harus dipersiapkan dan harus diambil dengan cermat. Kelima asas pemberian alasan berarti bahwa suatu ketetapan harus dapat didukung oleh alasan-alasan yang dijadikan dasar. Keenam Larangan *detournement de pouvoir*, sebagai asas umum pemerintahan yang baik memandang suatu wewenang tidak boleh digunakan untuk tujuan lain selain untuk mana ia diberikan (Akadun, 2007).

Good Public Governance (GPG) merupakan sistem atau aturan perilaku terkait dengan pengelolaan kewenangan oleh para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab dan akuntabel. Penerapan GPG mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perwujudan *Good Corporate Governance* oleh dunia dan penyelenggara Negara. Pelaksanaan GPG terutama sangat penting melalui penegakan kepatuhan terhadap hukum sehingga dapat dicegah terjadinya praktik suap, korupsi dan sejenisnya

Pelayanan publik dalam *good governance* merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi oleh negara dalam rangka

pencapaian tujuannya. Untuk itu penyelenggaraan pemerintah yang diharapkan bukan lagi pemerintah yang “banyak pemerintah” namun pemerintah yang “sedikit pemerintah” atau “pemerintah yang baik” (*better government*). Dalam rangka pelaksanaan *Good governance* maka ketiga unsur yang berada dalam ruang governance harus dapat bekerja dengan baik. unsur-unsur yang dimaksud tersebut : *state, private sector, dan society*.

II.4 Perspektif Ekonomi dan Bisnis Islam.

Pandangan Keynes sering dianggap sebagai awal dari pemikiran ekonomi modern. Ia banyak melakukan pembaharuan dan perumusan ulang doktrin-doktrin klasik dan neoklasik. Keynes menganggap peran pemerintah perlu dalam pembangunan. Keynes juga dianggap sebagai peletak dasar ekonomi makro, yang sebelumnya baik aliran klasik maupun neoklasik menggunakan analisis ekonomi secara mikro. Keynes melihat hubungan diantara variabel-variabel ekonomi seperti pendapatan, konsumsi, tabungan, pajak, pengeluaran pemerintah, ekspor impor, pengangguran, inflasi secara agregatif.

Begitupun dalam hal Perspektif Ekonomi dan Bisnis Islam yang berdasarkan ajaran Islam. Peran pemerintah sangat diperlukan. Peran pemerintah kembali dipertimbangkan sebagai solusi keluar dari penderitaan ekonomi yang berkepanjangan. Menurut Kahf, pasar menganut beberapa ide penting yaitu: kebebasan, intervensi pemerintah, dan aturan ekonomi Islam. Kebebasan yang dimaksud Kahf adalah kebebasan dalam melakukan kompetisi untuk memberikan yang terbaik. Pemerintah melalui perangkat hukumnya mesti hadir dalam keadaan tertentu untuk memastikan transaksi ekonomi berlangsung sesuai dengan aturan main dan tidak dibolehkan melakukan transaksi haram seperti transaksi ribawi. Pemerintah juga dapat menindak pelaku-pelaku curang yang sengaja menimbun barang untuk mendapatkan

keuntungan berganda atas kehilangan barang di pasar.

Peran pemerintah terasa sangat penting karena pemerintah dapat menetapkan, mengarahkan, dan melakukan tindakan bila sesuatu tidak dipatuhi. Dalam praktiknya, pemerintah dapat menggunakan dua institusi yaitu sistem peradilan dan al-hisbah, untuk memastikan pasar berfungsi dengan benar. (Kahf, 1997).

II.5. Penelitian Terdahulu.

II.5.1 Pengaruh Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Fasilitas Umum terhadap Keterpilihan Petahana dalam Pemilukada 2017.

Penelitian yang dilakukan oleh (Auliyah dkk., 2020) ini berkesimpulan bahwasanya bahwa proporsi belanja hibah tidak berpengaruh signifikan terhadap keterpilihan petahana pada Pemilukada 2017, Proporsi belanja bantuan sosial tidak berpengaruh terhadap keterpilihan petahana pada Pemilukada 2017, Proporsi belanja bantuan keuangan tidak berpengaruh terhadap keterpilihan petahana pada Pemilukada 2017, Proporsi belanja fasilitas umum tidak berpengaruh terhadap keterpilihan petahana pada Pemilukada 2017

II.5.2 Pengaruh Alokasi Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial terhadap Kualitas Pembangunan Manusia.

Penelitian yang dilakukan oleh (Zebua & Adib, 2014) menjelaskan bahwa Belanja hibah menurut peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada kelompok masyarakat.

Dalam penelitian ini, alokasi Belanja Hibah yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Jawa barat tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Dalam penelitian ini juga, alokasi belanja bantuan sosial pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM.

Hal ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa Belanja Bantuan Sosial merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat

II.5.3 Pengaruh Investasi dan Belanja Pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Aceh.

Penelitian yang dilakukan oleh (Mualiansyah & Mard, 2017) menjelaskan bahwa PDRB Aceh dipengaruhi cukup signifikan oleh Investasi dan Belanja Pemerintah.

III. METODE PENELITIAN.

Metode penelitian pada hakikatnya adalah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan maksud dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2018). Terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia.

III.1. Jenis Penelitian.

Metode penelitian yang berjenis kuantitatif dengan mengolah data secara statistik melalui aplikasi SPSS. Pengolahan data tersebut atas data sekunder atau data statistik berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan oleh lembaga atau institusi resmi baik pemerintah atau swasta. Metode kuantitatif dimaknai sebagai metode ilmiah/*scientific* karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit, empiris, obyektif, terukur, rasional dan sistematis. Sehingga dapat diartikan bahwa metode kuantitatif merupakan penelitian yang berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2022).

Kemudian hasil pengolahan data secara kuantitatif tersebut ditafsirkan juga secara kualitatif, yaitu dengan mengolah data kualitatif berdasarkan referensi yang sudah dibahas di dalam landasan teori maupun penelitian terdahulu. Metode kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangannya terhadap teori, praktis, kebijakan, masalah-masalah sosial dan tindakan serta hasil penelitian kualitatif menekankan pada makna daripada angka-angka (Satori & Komariah, 2012).

III.2. Waktu dan Tempat Penelitian.

Waktu pengerjaan dari tulisan penelitian ini dimulai dari hari Selasa 30 Januari 2023 hingga hari Senin 20 Februari 2023. Tempat penelitiannya adalah di lingkungan kampus Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor karena tidak melakukan wawancara dan pengumpulan data ke masyarakat. Sehingga hanya berfokus kepada pengolahan data saja secara berkelompok.

III.3 Data, Pengolahan Data dan Analisis Data Penelitian.

Data utama yang digunakan adalah data sekunder yang terdapat di dalam situs resmi seperti Badan Pusat Statistik, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, dan institusi lainnya, yang data tersebut bersifat “terbuka” atau “*open resources*” di internet. Data ini bersifat *time series* yang berawal dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2021.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.

IV.1. Gambaran Umum Data dan Obyek Penelitian.

Data yang digunakan yaitu data Belanja Hibah, Data Belanja Bantuan Sosial dan Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bogor yang dimulai sejak tahun 2009 hingga dengan tahun 2021.

Berikut adalah lampiran data yang digunakan.

Tabel IV.1 Lampiran Data.

Sumber: Data diolah, 2023.

(Dalam Miliar Rupiah)				
TAHUN	X1	X2	Y	Skor
2009	56,96	114,54	66,08	237,58
2010	66,08	139,46	92,93	298,47
2011	135,78	108,14	104,48	348,40
2012	105,44	13,37	120,33	239,13
2013	178,27	10,02	135,88	324,17
2014	90,67	11,94	151,29	253,90
2015	64,37	3,57	168,08	236,02
2016	108,86	43,25	184,25	336,35
2017	221,56	34,61	200,90	457,08
2018	518,18	22,26	219,24	759,68
2019	239,78	18,93	237,23	495,94
2020	257,14	52,36	235,95	545,45
2021	321,58	31,12	248,93	601,63
Validitas	rhitung	0,968201872	-0,197206451	0,771549323
	rtabel	0,37		
Keputusan		VALID	TIDAK VALID	VALID
	VARIAN	15973,83101	1869,734816	3349,748418
Reliabilitas	JML. VAR.P	21193,31425		25121,11173
	R11	0,234531668	Reliabilitasnya Rendah	

IV.2 Hasil Uji Instrumen.

IV.2.1. Hasil Uji Validitas.

Tabel IV.2 Hasil Uji Validitas

Validitas	rhitung	0,968201872	-0,197206451	0,771549323
	rtabel	0,37	0,37	0,37
	Keputusan	VALID	TIDAK VALID	VALID

Sumber: Data diolah, 2023

Dikarenakan variabel Belanja Hibah (X1), dan Produk Domestik Regional Bruto/PDRB (Y) nilai rhitung nya lebih dari nilai rtabel maka kedua variabel tersebut valid sesuai dengan rumus yang telah ditentukan. Dan untuk Variabel Belanja Bantuan Sosial (X2) yaitu nilai rhitung nya kurang daripada rtabel maka dari itu variabel X2 tidak valid.

IV.2.2 Hasil Uji Reliabilitas.

Tabel IV.3 Hasil Uji Reliabilitas

Reliabilitas	VARIAN	15973,83101	1869,734816	3349,748418	25121,11173
	JML. VAR.P	21193,31425			
	R11	0,234531668	Reliabilitasnya Rendah		

Sumber: Data diolah, 2023

Dikarenakan nilai R11 AlfaCronbach nya senilai 0,234 atau jika dibulatkan akan senilai 0,2 maka dari itu hasilnya adalah reliabilitas dari setiap variabel yang akan diujikan rendah.

IV.3. Hasil Uji Asumsi Klasik.

IV.3.1. Hasil Uji Normalitas.

Tabel IV.4 Hasil Uji Normalitas

	Tests of Normality					
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	,117	13	,200 [*]	,951	13	,611

*. This is a lower bound of the true significance.
 a. Lilliefors Significance Correction

Sumber : Data diolah, 2023

Karena data yang digunakan cukup banyak maka uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Data yang diujikan dalam uji normalitas ini berdistribusi dengan normal dikarenakan tingkat signifikansi diatas atau lebih dari tingkat error atau alfa yaitu $\text{sig } 0.200 > \alpha 0,05$.

IV.3.2 Hasil Uji Multikolinieritas.

Tabel IV.5 Hasil Uji Multikolinieritas

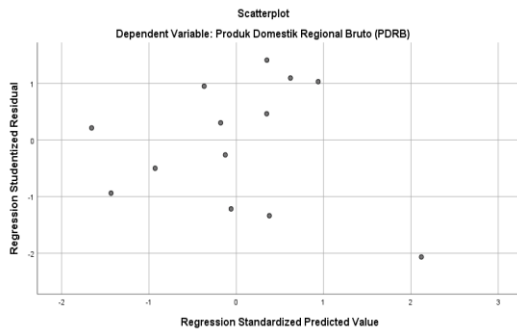
Model		Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF	
		B	Std. Error	Beta					
1	(Constant)	142,674	26,176		5,451	,000			
	Belanja Hibah	,266	,092	,581	2,908	,016	,896	1,116	
	Belanja Bantuan Sosial	-,528	,268	-,395	-1,974	,077	,896	1,116	

a. Dependent Variable: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Sumber : Data diolah, 2023

Model regresi ganda ini yang digunakan itu bebas dari Multikolinieritas dikarenakan nilai VIF setiap variabel kurang dari 10, $VIF < 10$. Dan nilai Tolerance nya lebih dari 0,1, $\text{Tolerance} > 0,1$.

IV.3.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Gambar
 V.1 Scatterplot
 Sumber : Data diolah, 2023

Dikarenakan data menyebar di atas dan di bawah angka 0 dan juga disekitarnya. Serta penyebaran titik tidak terfokus di atas dan di bawah saja juga penyebarannya tidak berpola maka Model Regresi Ganda tersebut tidak terjadi Heteroskedastisitas.

IV.3.4. Hasil Uji Autokorelasi.

Tabel IV.6 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,801 ^a	,642	,570	39,48565	1,196

a. Predictors: (Constant), Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah
 b. Dependent Variable: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Sumber : Data diolah, 2023

Model Regresi Ganda tersebut tidak terjadi autokorelasi antar variabel yang diujikan dikarenakan nilai Durbin-Watson tidak melebihi angka 2 jadinya tidak ada variabel pengganggu.

IV.4 Hasil dan Analisis Regresi Linier Berganda.

IV.4.1 Hasil dan Analisis Uji Parsial.

Tabel IV.7 Tabel Coeffisien

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	.(Constant)	142,674	26,176		5,451	,000		
	Belanja Hibah	,266	,092	,581	2,908	,016	,896	1,116
	Belanja Bantuan Sosial	-,528	,268	-,395	-1,974	,077	,896	1,116

a. Dependent Variable: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Sumber : Data diolah, 2023

Uji t parsial untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari masing-masing variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

Didapatkan:

1. t hitung untuk X1 (Belanja Hibah) = 2,908 > t tabel 2.02439 (TWOTAIL)

Probabilitas/sig 0.016 < ALFA 0.05

maka dapat disimpulkan ADA pengaruh yang signifikan antara X1 (Belanja Hibah) terhadap Y (Pendapatan Daerah Regional Bruto/PDRB)

2. t hitung untuk X2 (Belanja Bantuan Sosial) = -1,974 < t tabel 2.02439 (TWOTAIL)

Probabilitas/sig 0.077 > ALFA 0.05

maka dapat disimpulkan TIDAK ADA pengaruh yang signifikan antara X2 (Belanja Bantuan Sosial) terhadap Y (Pendapatan Daerah Regional Bruto/PDRB).

IV.4.2. Model Persamaan Regresi Berganda.

Model persamaan Regresi Berganda ialah:

$$Y = 142,674 + 0,266X_1$$

$$Y = 142,674 - 0,528X_2$$

Dapat Disimpulkan:

1. Diperoleh hasil nilai konstanta sebesar 142,674 yang mengandung arti bahwa ketika nilai Belanja Hibah (X1), dan Belanja Bantuan Sosial (X2) bernilai Rp 0, maka nilai Produk Domestik Regional Bruto/PDRB (Y) sebesar Rp 142,674.
2. Nilai koefisien regresi untuk variabel X1 (Belanja Hibah) yakni sebesar 0,266 yang berarti bahwa ketika terdapat penambahan Rp 1.000 dari setiap nilai X1 (Belanja Hibah) dan maka nilai Y (Produk Domestik Regional Bruto/PDRB) akan meningkat sebesar Rp 408,674.
3. Nilai koefisien regresi untuk variabel X2 (Belanja Bantuan Sosial) yakni sebesar -0,528 yang berarti bahwa etika terdapat penambahan Rp 1.000 dari setiap nilai X2 (Belanja Bantuan Sosial) dan maka nilai Y (Produk Domestik Regional Bruto/PDRB) akan Menurun sebesar Rp 385,326

Terlihat dari nilai koefisien regresi X2 yang bernilai NEGATIF, sehingga dapat ditarik kesimpulan jika arah pengaruh variabel X2 terhadap Y adalah berlawanan arah artinya semakin banyak Belanja Bantuan Sosial (X2) semakin SEDIKIT JUMLAH Produk Domestik Regional Bruto/PDRB (Y).

IV.4.3. Hasil dan Analisis Uji F (Simultan).

Tabel IV.8 Anova

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	27955,711	2	13977,855	8,965	,006 ^b
	Residual	15591,167	10	1559,117		
	Total	43546,878	12			

a. Dependent Variable: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
 b. Predictors: (Constant), Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah

Sumber: Data diolah, 2023

Uji ini uuntuk mengetahui apakah semua variabel independent (X1, X2), memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Y).

Hasil yang di dapatkan yaitu :

Nilai F hitung 8,965 > Ftabel 3,26 dan Probabilitas/Sig 0.006 < 0.05

Maka dapat disimpulkan ADA pengaruh yang signifikan antara X1, dan X2 secara bersama sama terhadap Y.

IV.5 Analisis Kualitatif terhadap Hasil Regresi Linier Berganda (Usulan Gagasan Penerapan *Good Governance* di Pemerintah Kabupaten Bogor).

Dapat dilihat bahwasanya variabel X1 X2 berpengaruh secara signifikan terhadap Y dilihat dari hasil begitu besar dikarenakan semua variabel independen yang diujikan bagus. Artinya bahwa variabel Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial secara bersama-sama bisa mempengaruhi Pendapatan Daerah Regional Bruto Kabupaten Bogor. Namun, dalam data yang sudah diolah terdapat data yang tidak konsisten dalam Variabel Belanja Bantuan Sosial, sehingga data tiap tahun berubah-ubah dengan sangat jauh berbeda. Namun jika penerapan *Good Governance* dapat dilaksanakan dengan baik, sistem atau aturan perilaku terkait dengan pengelolaan kewenangan oleh para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab dan akuntabel.

Penerapan *Good Governance* mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perwujudan *Good Governance* oleh dunia dan penyelenggara Negara. Pelaksanaan *Good Governance* terutama sangat penting melalui penegakan kepatuhan terhadap hukum sehingga dapat dicegah terjadinya praktik suap, korupsi dan sejenisnya. Sehingga secara perlahan-lahan PDRB akan membaik dikarenakan penerapan *Good Governance* terhadap pelaksanaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Bogor.

IV.6. Perspektif Ekonomi dan Bisnis Islam Mengenai Pengaruh Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial, terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

Dalam perspektif Ekonomi dan Bisnis Islam, produksi bukan ditujukan semata-mata untuk menghasilkan materi yang lebih tinggi nilai ekonomisnya. Namun, proses produksi juga harus bisa mengantarkan manusia naik ke derajat yang lebih tinggi melalui melakukan serangkaian aktivitas produksi yang mendukung nilai-nilai moral. Produksi barang-barang yang berpotensi menjauhkan manusia dari kepatutan yang digariskan dalam agama tidak boleh dilakukan. Pertanggungjawaban atas aktivitas produksi dimaknai sebagai tanggungjawab yang dibawa ke akhirat.

Dalam kerangka di atas, maka peran pemerintah sangat signifikan dalam menjaga belanja hibah, belanja bantuan sosial agar tidak hanya tetap berpengaruh positif terhadap produk domestik bruto, tetapi juga dengan disertai nilai-nilai moralitas Islam. Jika terjadi anomali seperti peningkatan belanja sosial akan mengurangi produk domestik bruto, tidak seperti halnya belanja hibah yang meningkatkan produk domestik bruto, maka keadaan tersebut setidaknya terantisipasi dengan kebijakan yang sudah ditegakkan oleh pemerintah seperti kebijakan ekonomi yang memaksimalkan pemanfaatan sumber daya, mengecilkan *gap* (kesenjangan) ekonomi melalui pelarangan penumpukan harta hanya pada segelintir orang, dan pelaksanaan aturan transaksi yang adil yang di dalam sejarah Islam kita mengenal perangkat hukum al-hisbah. (Kahf, 1997).

V. SIMPULAN.

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel X1 (Belanja Hibah) berpengaruh positif terhadap Y (Produk Domestik Regional Bruto/PDRB) senilai 0,266

2. Variabel X2 (Belanja Bantuan Sosial) berpengaruh Negatif terhadap Y (Produk Domestik Regional Bruto/PDRB) senilai -0,528
3. Dan juga ada pengaruh yang signifikan antara X1 (Belanja Hibah), dan X2 (Belanja Bantuan Sosial), secara bersama sama terhadap Y (Produk Domestik Regional Bruto/PDRB).
4. Dalam perspektif Ekonomi dan Bisnis Islam, produksi bukan ditujukan semata-mata untuk menghasilkan materi yang lebih tinggi nilai ekonomisnya. Namun, proses produksi juga harus bisa mengantarkan manusia naik ke derajat yang lebih tinggi melalui melakukan serangkaian aktivitas produksi yang mendukung nilai-nilai moral.
5. Peran pemerintah sangat signifikan dalam menjaga belanja hibah, belanja bantuan sosial agar tidak hanya tetap berpengaruh positif terhadap produk domestik bruto, tetapi juga dengan disertai nilai-nilai moralitas Islam. Jika terjadi anomali seperti peningkatan belanja sosial akan mengurangi produk domestik bruto, tidak seperti halnya belanja hibah yang meningkatkan produk domestik bruto, maka keadaan tersebut setidaknya terantisipasi dengan kebijakan yang sudah ditegakkan oleh pemerintah seperti kebijakan ekonomi yang memaksimalkan pemanfaatan sumber daya, mengecilkan *gap* (kesenjangan) ekonomi melalui pelarangan penumpukan harta hanya pada segelintir orang, dan pelaksanaan aturan transaksi yang adil yang di dalam sejarah Islam kita mengenal perangkat hukum al-hisbah.

DAFTAR PUSTAKA.

- Akadun. (2007). *Good Governance dalam Otonomi Daerah*. Sosiohumaniora: Journal of Social Sciences and Humanities, 9(1), 37–47. <http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/5375>
- Auliyah, U., Suhairi, & Yeni, N. S. (2020). *Pengaruh Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Fasilitas Umum Terhadap Keterpilihan Petahana dalam Pemilukada 2017*. Ekonomis: Journal of Economics and Business, 4(1), 62. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.117>
- Karim, A. A. (2007). *Ekonomi Makro Islami* (1–2 ed.). PT Raja Grafindo Persada.
- Satori, D., & Komariah, A. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (4 ed.). Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif* (Setiyawami (Ed.); 1 ed.). Alfabeta.
- Zebua, F. W., & Adib, Z. (2014). *Pengaruh Alokasi Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, 3(1), 1–18.